

## DAFTAR PUSTAKA

(n.d.). Retrieved from <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1>

(n.d.). Retrieved from [www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/](http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/)

Dr. H. Ilyas Ismail, M.Pd., M.Si. (2018) *Metodelogi penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.

Agus Bandiyono, N. P. (2019). E-Rekon LK Application as a Form of Accounting and E-Government Information Systems Implementation in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 8, Issue 3.*

Asep saepul hamdi, E. (2012). *metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. yogyakarta: CV Budi Utama.

Dr.Darmawan M.A.B. (2020). *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UNY Press.

Robert r.Moeller (2014). *Executive's Guide To COSO Internal Control*.Canada,John Wiley& Sons.Inc.

Friska Langelo, D. P. (2015). nalisis Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Emba Vol.3 No.1*, 1-8.

HAM, K. w. (2021). *Buku Pintar E-Rekon*. Jawa Barat: Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM . Jean Garbil Oflagi, H. M. (2018). Analisis Aplikasi E-Rekon-LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara Provinsi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern vol.13 No.02.*

Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd. (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Buku Pintar E-Rekon ,Pengayoman.

KPPN Jakarta V (2018). Buku Pintar Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta Selatan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta V.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (2021).Modul e-Rekon& LK .

Kurnia Kusuma Wijayanti, N. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manfaat Bersih Sistem E-Rekon & Lk Dengan Pendekatan Modifikasi Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone Dan Mclean (Studi pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Sekayu ). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol.7 No.02*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited)*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Limbong, D. E. (2016). ,Rekonsiliasi Data Keuangan Dan Karakterisasi Satuan Kerja Dengan Teknik Data Mining. *Indonesia Treasury Review Vol.1,No.3*.

Lisawanto. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja Dalam Aplikasi E-Rekon LK Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi Dan Akuntansi Pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Buntok Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Volume 6 Issue 2, 56-69*.

Lynford Graham (2015). *Internal Control Audit and Compliance documentation and testing under the new coso Framework*. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

Mahmudi (2016). *Akuntansi Sektor Publik*,Yogyakarta,UII Press

Meyza, R. (2014). Analisis Proses Rekonsiliasi Eksternal Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Sijunjung. *Skripsi*.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi*, Jakarta :Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1236/K/SU/2011

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.238/PMK.05/2011

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.40/PMK.05/2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2015

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.01/2008

Peraturan Meneteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 270/ PMK.05/2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor.71 tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262 / PMK.0 1 /20 16

Pemerintah, K. S. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Prof.Dr.Mardiasmo, M. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.: Andi.

Prof.Dr.Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Riyanto, S. M. (2016). *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru*.

Rizki Arvi Yunita, S. d. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi Pp 71/2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan . *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*.Vol. 3,No. 2 , 101-113.

Saifhul Anuar Syahdan, J. A. (2012). Analisis Proses Rekonsiliasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Banjarmasin. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol.13 No. 1* .

Sirajuddin Saleh. (2017) *Analisis Data Kualitatif* . Bandung: Pustaka Ramadhan

Suryani, A. M. (2019). Penerapan aplikasi E-Rekonsiliasi & LK Dalam Proses Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Singaraja. *Jurnal Riset Akuntansi Vol. 8*.

Tambunan, T. S. (2019). *Standar Operasional Prosedur Intansi Pemerintah*. Bandung: Yrama Widya.

Untung Rahardja, Q. A. (2018). Efektivitas Akuntansi online Dalam Menunjang Proses Rekonsiliasi. *NJCA - Volume 3, Nomor 2*, 105-112.

Untung Rahardja, Q. A. (2018). Efektivitas Akuntansi Online Dalam Menunjang Proses Rekonsiliasi. *NJCA - Volume 3, Nomor 2*, 105 – 112 .

Untung Raharja, Q. A. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Demak: Penerbit Pustaka Magister.

Yunita, R. A. (n.d.). AkruaI Sebagai Implementasi Pp Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang). *Skripsi*.

V.Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.Penerbit Pustaka Baru Press